

ABSTRAK

Pada pemilu 2019 di Lapas Kelas IIB Ciamis hanya 25 dari 325 narapidana yang masuk dalam DPT. Hal tersebut menyebabkan pemilu terhambat dan terdapat narapidana yang kehilangan hak politiknya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait dengan perlindungan hak politik narapidana Lapas Kelas IIB Ciamis oleh KPU di Kabupaten Ciamis Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan politik kewarganegaraan untuk menggambarkan bagaimana perjuangan narapidana dan upaya KPU dalam melindungi hak politik narapidana melalui empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu dimensi keanggotaan, dimensi status legal, dimensi hak, dan dimensi partisipasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan metode analisis data model interaktif. Uji validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber guna mendapat data yang akurat dan dapat menunjang berjalannya penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat 17 dari 322 narapidana yang tidak terlindungi hak politiknya dan tidak bisa memilih dalam pemilu. Kendati demikian narapidana aktif memperjuangkan hak politiknya. Perjuangan narapidana mencakup empat dimensi politik kewarganegaraan yaitu perjuangan dalam dimensi keanggotaan, status legal, hak politik, dan partisipasi. Negara juga hadir melindungi hak politik narapidana melalui KPU. Untuk melindungi hak politik narapidana KPU menerapkan cara perlindungan hak politik yang baru serta memperbaiki proses perlindungan hak politik narapidana. Interaksi terjadi antara narapidana sebagai warga negara dan KPU sebagai perpanjangan tangan negara. Pada interaksi tersebut sering terdapat pertentangan terutama ketika narapidana telah berjuang namun masih terdapat sebagian dari mereka yang tidak terlindungi hak politiknya.

Kata Kunci: Politik kewarganegaraan, Narapidana, Hak politik.

ABSTRACT

In the 2019 election at the Lapas Kelas IIB Ciamis, only 25 out of 325 prisoners were included in the DPT. This causes elections to be hampered and there are prisoners who lose their political rights. This research aims to conduct an analysis related to the protection of the political rights of Lapas Kelas IIB Ciamis prisoner by the KPU Ciamis in the 2024 General Election. This research uses political citizenship to describe how prisoners struggle and the KPU efforts to protect the political rights of prisoners through four dimensions of political citizenship namely the membership dimension, legal status dimension, rights dimension, and participation dimension. This research is qualitative research with a case study method. Data collection uses interview, observation and documentation methods. Determination of informants was carried out using the purposive sampling method. This research uses an interactive model data analysis method. Data validity testing was carried out using source triangulation techniques in order to obtain accurate data that could support the progress of the research. The research results show that there are still 17 out of 322 prisoners whose political rights are not protected and cannot vote in elections. Nevertheless, prisoners actively fight for their political rights. Prisoners' struggles cover four dimensions of political citizenship, namely struggles in the dimensions of membership, legal status, political rights and participation. The state is also present to protect prisoners' political rights through the KPU. To protect the political rights of prisoners, KPU is implementing new methods and improving the process of protecting prisoners' political rights. Interaction occurs between prisoners as citizens and KPU as an extension of the state. In these interactions there are often conflicts, especially when prisoners have struggled but there are still some of them whose political rights are not protected.

Keyword: Political citizenship, Prisoner, Political rights.